

PAKET 2.2 DITARGET SELESAI AKHIR 2024

Pembangunan Tol Jogja-Solo Sudah Mencapai 26 Persen

SLEMAN (KR) - Pembangunan jalan tol Jogja-Solo sepanjang 3,25 kilometer yang menghubungkan Kalurahan Trihanggo Gamping dan Kalurahan Tirtoadi Mlati ditarget selesai akhir 2024. Sampai saat ini, progres konstruksinya telah mencapai 26 persen, sedangkan pembebasan lahan mencapai 71,4 persen.

"Sampai dengan 4 Februari 2024, progres pembebasan lahan mencapai 71,4 persen dengan area yang dapat dikerjakan mencapai 22,3 persen. Kalau konstruksinya, sudah 26 persen," kata pejabat humas PT Adhikarya, kontraktor yang membangun jalan tol Jogja-Solo paket 2.2, Agung Murhandjanto, Selasa (6/2).

Diungkapkan, kebutuhan lahan untuk pembangunan jalan tol Jogja-Solo paket 2.2 ini sebanyak 889 bidang atau

39.89 hektare. Dari kebutuhan tersebut, lahan yang sudah bebas 724 bidang (28,49 hektare) atau setara dengan 71,4 persen. Sedangkan lahan yang belum bebas 161 bidang atau 11.39 hektare setara dengan 28,6 persen.

"Untuk progres konstruksi, pembangunan proyek strategis nasional ini telah mencapai 26 persen. Kontraktor di lapangan masih mengerjakan pembangunan box culvert, box jalan desa, jembatan, penimbunan hingga pondasi

beton untuk tiang atau bored pile. Dari ratusan bored pile, sampai saat ini kami sudah membangun 14. rinciannya 10 di Padukuhan Simping dan 4 di Sanggrahan," beber Agung, seraya menambahkan, kalau semua berjalan lancar pembangunan proyek jalan tol yang mencapai Ringroad Sleman ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024.

Sementara Manager Pengendalian Pembangunan Jalan tol Jogja-Solo paket 2.2 PT

JMJ (Jasa Marga Jogja-Solo) Aldian Wiga mengungkapkan, jalan tol tersebut akan terintegrasi sebagai pintu on-off untuk jalan tol Jogja-Bawen seksi 1 yang lebih awal dibangun dari Tirtoadi hingga simpang susun Banyurejo, sepanjang 8,8 kilometer.

"Target kami akhir tahun 2024. Tentunya dengan catatan, semua lahan tersedia dan lain sebagainya. Kalau semua smooth dan itu tercapai, akhir tahun depan mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan paket 2.2 ini. Karena ini terintegrasi dengan jalan tol Jogja-Bawen seksi 1. Tentu, kalau di sana sudah selesai dan kami belum juga kan tidak bisa digunakan



KR-Hasto Sutadi

Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Trihanggo dan Tirtoadi bakal memotong Jalan Kabupaten di Tirtoadi Mlati.

karena tidak ada akses. berkoordinasi dengan juga selalu inline," kata Makanya kami selalu Jogja-Bawen, target kami Aldian. (Has)-f

PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL Bupati Ajak Rois dan Kamituwa ke Jombang



KR-Istimewa

Bupati Kustini bersama para rois dan kamituwa Sleman.

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat mengadakan pembinaan mental spiritual, 5-6 Februari 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Jombang dan Surabaya tersebut diikuti 267 orang terdiri dari 121 Rois dan 72 Kamituwa.

Bupati Kustini yang ikut mendampingi rois dan kamituwa menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas anggota kamituwa dan rois Kabupaten Sleman. Dengan melakukan studi tiru, diharapkan kamituwa dan rois dapat meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati sekaligus menyampaikan apresiasi atas kinerja kamituwa dan rois Sleman yang telah membersamai masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. "Melalui pertemuan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rois dan kamituwa yang sudah mewujudkan pelayanan yang baik di Kabupaten Sleman. Tentu saja Pemkab Sleman tidak bisa bergerak sendiri, sehingga perlu tingkatkan sinergi ini untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Sleman. Dan diharapkan forum rois segera dibentuk untuk tingkat kapanewon maupun kalurahan," ujar Bupati, Selasa (6/2).

Sementara Ketua Forum Kamituwa Kalimasada Sleman Prasetyo Sujanarka menyampaikan, momen pembinaan mental spiritual menjadi kesempatan baik untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Forum Kamituwa Sleman. "Anggota Kamituwa untuk meningkatkan kesiapan diri dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang dapat terjadi kapan saja, seperti halnya kasus kenakalan remaja yang kerap terjadi," katanya.

Sedangkan Ketua Forum Rois Sleman Salamun berharap dengan pertemuan ini anggota Forum Rois Sleman dapat memiliki sistem manajemen yang lebih tertata. Dengan begitu, diharapkan Forum Rois Sleman dapat tetib organisasi dan dapat menjalankan ketugasan dengan lebih baik. (Has)-f

BKS-PTIS Desak Tempatkan Hukum Jadi Panglima

SLEMAN (KR) - Demokratisasi telah berumur dua dekade, namun tidak menjadi dewasa bahkan mengalami kemunduran. Mekanisme *check and balances* yang berfungsi membatasi kekuasaan, cenderung melemah dan terpusat pada kelompok tertentu. Apa yang terjadi cenderung menuju otoritarianisme baru.

Ketua Umum Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia (BKSPTIS) Prof Fathul Wahid PhD dan Sekretaris Umum Prof Dr H Syafrinaldi SH MCL mengeluarkan Seruan Moral 'Menyelamatkan Demokrasi dan Menegakkan Daulat Rakyat' di UII Jalan Kaliurang Sleman, Selasa (6/2). BKS PTIS sedikitnya beranggotakan 350 anggota.

Untuk merespons situasi dan melaksanakan *amar ma'ruf nahi*

munkar, BKS PTIS menyerukan *Pertama* menuntut pemerintah menegakkan etika kebangsaan dengan mewujudkan netralitas dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum, sebut Fathul, merupakan mekanisme lima tahunan untuk menghormati kedaulatan rakyat. Menyelenggarakannya dengan adil adalah tuntutan konstitusi dan demokrasi.

Kedua, BKS PTIS mendesak pemerintah untuk menempatkan hukum sebagai panglima. Pemerintah wajib tunduk pada semangkat negara hukum (*rule of law/rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).

Yang *ketiga*, mendorong pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dengan mendasarkan setiap kebijakan pada kepentingan rakyat, bukan pada ke-

pentingan dan kemauan kelompok elit atau oligark tertentu.

Keempat, menyeru penyelenggara pemilihan umum untuk bekerja secara profesional dan berintegritas. Sehingga menghasilkan pemimpin yang absah dan dapat dipercaya. *Kelima*, mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama berjuang melawan segala upaya pendangkalan demokrasi, sebagai ikhtiar merawat cita-cita kemerdekaan.

Dan *keenam*, mengimbau semua anggota BKSPTIS untuk mendorong civitas akademiknya menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang terbaik, beretika, taat hukum, memiliki rekam jejak yang bersih, sesuai dengan nurani dan tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun. (Fsy)-f

Pengembangan Desa Wisata DIY Dapat Sorotan Diskusi Senator Hafidh Asrom, GKR Hayu, dan Dinas Pariwisata



GKR Hayu didampingi anggota DPD/MPR RI Drs HA Hafidh Asrom MM saat berbicara di hadapan para pengelola desa wisata.

YOGYA (KR) - Desa-desi wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diakui banyak menggunakan tanah kas desa (TKD). Dalam perjalanannya, selain memberikan dampak positif juga ada persoalan yang dihadapi.

Sejumlah persoalan yang dihadapi desa wisata mendapat sorotan dalam Diskusi Publik dan Jaring Aspirasi di Asram Edupark bertema "Mengembangkan Desa Wisata Berkelanjutan", Senin 5 Februari 2024.

Diskusi dihadiri Senator Drs HA Hafidh Asrom MM, GKR Hayu yang mewakili pihak Kraton Yogyakarta, dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Ishadi Zayid, serta para pengelola desa wisata di Kabupaten Sleman.

Dalam diskusi terungkap, dalam pengembangan desa wisata saat ini terjadi persoalan seperti kehadiran BUMKAL Desa Wisata yang pada kenyataannya "menggambil alih" peran pengelola atau penggerak desa wisata sebelumnya. Selain itu adanya investor besar yang "menggusur" peran masyarakat dalam mengelola desa wisata di daerahnya.

Di sisi lain pemanfaatan tanah kas desa, terutama terkait tanah Sultan Ground, disinyalir banyak yang tidak sesuai dengan tata ruang penggunaannya, termasuk untuk pariwisata.

memanfaatkan tanah kas desa. Ia berharap, dengan duduk bersama akan ada solusi terbaik atas kasus tersebut.

Ishadi mengakui, sebagian besar desa wisata yang berkembang di Sleman telah memanfaatkan tanah kas desa.

Ada desa wisata yang memang dibangun dan dikembangkan di atas tanah kas desa, tapi tidak sedikit juga yang memanfaatkan tanah kas desa sebagai area pengembangan dari destinasi wisata. Misalnya untuk area outbound, camping ground dan lain sebagainya.

"Harus diakui, sebagian juga belum mengantongi izin dari gubernur. Maka perlu ada solusi terbaik. Karena tidak mungkin juga kan kalau desa-wisatanya lantas tidak beroperasi. Karena bagaimanapun aktivitas di desa wisata telah membantu perekonomian warga. Mungkin kami harus memohon adanya diskresi atas kasus seperti ini. Sebab di lapangan, nyata pemanfaatan tanah kas desa itu bukan untuk kepentingan perorangan, tapi untuk warga," katanya.

Ishadi menyampaikan hal ini, lantaran banyak pengelola desa wisata yang hadir dalam diskusi tersebut, mengungkapkan permasalahan terkait pemanfaatan tanah kas desa. Tidak sedikit pengelola desa wisata yang harus gigit jari tidak bisa menerima bantuan sarana prasarana, karena mereka belum mengantongi izin pemanfaatan tanah kas desa dari gubernur.

"Kami harus bertindak adil. Pengelola desa wisata yang memanfaatkan tanah kas desa dan belum mengantongi izin dari gubernur, tidak bisa mendapatkan bantuan sarana

prasarana," lanjut Ishadi. Sementara itu GKR Hayu mengakui pihak kraton kini terus melakukan pendataan atau inventarisasi tanah Sultan Ground (SG). Hal ini terkait dengan banyaknya tanah yang "hilang" setelah diadakan pengecekan.

GKR Hayu juga menyebut bahwa tanah kas desa/tanah SG juga banyak digunakan yang tak sesuai dengan ketentuan tata ruang dan pemanfaatan.

Terkait dengan pengembangan desa wisata, GKR Hayu menyarankan agar melibatkan Karang Taruna daerah setempat, termasuk dalam pemanfaatan sistem informasi digital seperti media sosial.

Ia menginformasikan bahwa ada Karang Taruna di DIY yang sukses mengelola media sosial dengan jumlah pengikutnya yang fantastis 5 juta orang.

Sekretaris Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Sleman, Esti mengungkapkan, problem terkait desa wisata sangat beragam. Menurut pengelola Desa Wisata Grogol di Sleman barat ini, meski sudah menjadi bagian dari sumber peningkatan kesejahteraan, masih banyak warga yang belum maksimal dan serius dalam mengelola desa wisata.

Ia menyebut, SDM yang serius mengelola desa wisata kebanyakan adalah orang-orang yang sudah berkeluarga dan bahkan kalangan orangtua. Sedangkan anak-anak muda yang semestinya lebih potensial karena akrab dengan dunia digital, masih terlihat enggan untuk ikut mengelola. "Yang pemuda, belum semua bisa merangkul mereka akan ikut aktif mengelola," kata Esti.

Senator atau anggota

DPD/MPR RI Hafidh Asrom mengatakan, SDM masih menjadi persoalan serius, termasuk dalam mengelola desa wisata. Bahkan, dirinya melihat daerah lain lebih serius menyiapkan SDM di bidang kepariwisataan dibanding Yogyakarta yang menyandang status Kota Pariwisata.

"Saya sependapat, kalau kita harus serius menyiapkan generasi muda. Kalau yang aktif rata-rata orangtua, siapa nanti yang akan meneruskan mengelola desa wisata dan kepariwisataan di DIY ini?," katanya.

Guna membantu menyiapkan SDM yang profesional ini, Hafidh meminta pengelola desa wisata untuk melakukan pendataan terkait potensi SDM di wilayah masing-masing. Dari pendataan tersebut, apabila memang diperlukan pengikutnya yang fantastis 5 juta orang.

"Bukan hanya pendidikan, bisa jadi perlu pelatihan-pelatihan khusus. Data itu menjadi penting, agar program kita bisa tepat sasaran. Saya siap membawa aspirasi para pengelola desa wisata ke pihak-pihak yang terkait. Termasuk siap mencari beasiswa, agar pemuda-pemuda dari kampung desa wisata dapat melanjutkan studinya.

"Bukan hanya pendidikan, bisa jadi perlu pelatihan-pelatihan khusus. Data itu menjadi penting, agar program kita bisa tepat sasaran. Saya siap membawa aspirasi para pengelola desa wisata ke pihak-pihak yang terkait. Termasuk siap mencari beasiswa, agar pemuda-pemuda dari kampung desa wisata dapat melanjutkan studinya. Sebagai pengelola desa wisata harus melibatkan masyarakat, termasuk yang dikelola oleh BUMKAL maupun investor. Ia menyontohkan Asram Edukpark yang masuk dalam kampung wisata, dalam berbagai kegiatannya melibatkan warga setempat seperti mengelola parkir. (Chaidir)-f



Anggota DPD/MPR RI Drs HA Hafidh Asrom MM (berdiri) saat berbicara di hadapan para pengelola desa wisata.

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp (0274)868413, Fax (0274) 868413

Mendekatkan APBD ke Masyarakat

SLEMAN (KR) - Sebagai wakil rakyat, Anggota DPRD Sleman dari Fraksi Golkar Guntur Yoga Pumawan ST akan lebih memaksimalkan perannya dalam mengawal dan merealisasikan aspirasi dari masyarakat. Dengan harapan banyak program dari pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat. "Saya akan mendekatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman ke masyarakat. Salah satu program menurunkan program-program dari pemerintah ke masyarakat," kata Guntur Yoga Pumawan ST, Selasa (6/2).

Guntur Yoga Pumawan ST
Anggota DPRD Sleman dari Fraksi Golkar

KR-Istimewa

Guntur Yoga Pumawan ST

membantu para petani agar hasil produksinya lebih meningkat. "Sekarang ini biaya produksi pertanian cukup tinggi. Dengan adanya bantuan traktor dan hand sprayer bisa meringankan biaya produksi. Kemudian motor roda tiga bisa untuk mengangkut hasil pertanian," ujar mantan Lurah Jogotirto selama tiga periode ini.

Di samping itu, Guntur juga membawa program dari APBD Kabupaten Sleman dengan pemasangan beberapa tower wifi setinggi 40 meter dengan anggaran Rp 111 juta di Tegaltirto, Sendangtirto dan Kalitirto Berbah. Dengan adanya tower wifi untuk mendukung masyarakat meleak digital. "Digitalisasi sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Mau tidak mau, masyarakat harus beradaptasi dengan menggunakan teknologi," terangnya.

Selain itu, lanjut Guntur, dengan adanya wifi gratis ini diharapkan memunculkan generasi milenial yang dapat membantu masyarakat dalam pemasaran digital. Sehingga produk UMKM yang ada di masyarakat dapat dikenal lebih luas. "Untuk memasarkan produk itu dibutuhkan jaringan yang kuat dan cepat. Dengan adanya tower wifi ini menjadi solusi bagi masyarakat dalam memasarkan produknya," tuturnya. (Sni)-d